

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SD Negeri 25 Banda Aceh, manajemen layanan pendidikan inklusif di sekolah ini masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam semua tahap POAC (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengendalian). Meskipun ada upaya untuk mengimplementasikan kebijakan inklusi, terdapat kesenjangan antara kebijakan tersebut dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tidak efektif, keterbatasan dalam pelaksanaan, serta pengendalian yang tidak berjalan dengan optimal serta kurangnya pemantauan berkelanjutan terhadap program pendidikan inklusif .

Perencanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 25 masih belum terstruktur dengan baik, dengan visi yang belum sepenuhnya inklusif dan terbatasnya strategi jangka panjang yang dapat mendukung keberhasilan program ini. Terbatasnya anggaran dan fasilitas, serta kurangnya kolaborasi dalam pengembangan kurikulum, menunjukkan bahwa perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan perlu segera diperbaiki.

Pengorganisasian yang tidak efektif juga terlihat dari kurangnya koordinasi antar guru dan pembagian tugas yang tidak jelas, sementara sumber daya yang ada, seperti shadow teacher, masih sangat bergantung pada dukungan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dan fasilitas masih perlu diperbaiki agar tujuan inklusi dapat tercapai dengan baik.

Dalam hal pelaksanaan, implementasi pendidikan inklusif terhambat oleh keterbatasan sumber daya, serta kurangnya dukungan dari pengawas dan dinas pendidikan. Meskipun ada pelatihan eksternal, dukungan dari internal sekolah masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan banyak ABK kesulitan mengikuti pembelajaran

di kelas, yang sering kali berakhir dengan mereka keluar kelas tanpa keterlibatan dalam kegiatan belajar. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan kelas yang lebih adaptif dan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan individual siswa, terutama bagi ABK.

Pengendalian terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif juga belum optimal, karena tidak ada sistem evaluasi yang memadai dan tindak lanjut yang jelas terhadap hasil evaluasi. Kurangnya dokumentasi khusus untuk ABK dan audit terhadap pelaksanaan program inklusi semakin memperburuk kondisi ini. Evaluasi yang berkelanjutan dan umpan balik yang konstruktif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program inklusif dapat berjalan dengan efektif.

Secara keseluruhan, meskipun SD Negeri 25 Banda Aceh telah memulai langkah-langkah untuk menerapkan pendidikan inklusif, manajemen layanan pendidikan inklusif di sekolah ini masih jauh dari harapan. Untuk memperbaiki implementasi pendidikan inklusif, diperlukan perencanaan yang lebih matang, pengorganisasian yang lebih baik dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas, pelaksanaan yang lebih terstruktur, serta pengendalian yang lebih efektif dalam bentuk evaluasi dan tindak lanjut.

Dukungan yang lebih besar dari pengawas, dinas pendidikan, serta pihak eksternal sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas manajemen layanan pendidikan inklusif di sekolah ini. Oleh karena itu, sekolah perlu menyusun rencana aksi yang lebih terstruktur, memperbaiki koordinasi antar guru, serta memberikan pelatihan yang lebih komprehensif bagi guru agar dapat mengelola kelas inklusif dengan lebih efektif. Ke depannya, strategi jangka panjang, peningkatan kapasitas guru, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas dan dapat menjangkau seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, terdapat beberapa

implikasi yang penting baik bagi kebijakan pendidikan, praktik di lapangan, maupun pengembangan lebih lanjut dari pendidikan inklusif di SD Negeri 25 Banda Aceh dan sekolah-sekolah lain yang memiliki tantangan serupa. Implikasi-implikasi ini perlu dipertimbangkan dengan serius untuk memperbaiki dan memperkuat manajemen layanan pendidikan inklusif agar lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan layanan yang optimal bagi siswa dengan kebutuhan khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 25 Banda Aceh belum sepenuhnya mendukung implementasi yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pendidikan inklusif yang lebih konkret dan jelas. Pemerintah, dinas pendidikan, dan lembaga terkait perlu memperbaharui kebijakan yang ada, memberikan dukungan lebih besar terhadap sekolah dalam bentuk anggaran, fasilitas, dan pelatihan berkelanjutan. Perencanaan pendidikan inklusif harus menjadi prioritas, dengan penyusunan strategi yang lebih rinci dan realistis, serta adanya penyesuaian kebijakan yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ABK secara spesifik. Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala dari pengawas pendidikan dan dinas pendidikan menjadi kunci untuk memastikan kebijakan ini benar-benar diterapkan secara efektif.

Pengorganisasian yang belum optimal dalam hal pembagian tugas guru, koordinasi antar guru, serta pengelolaan fasilitas menunjukkan perlunya perubahan dalam manajemen sumber daya manusia dan fasilitas di sekolah. Untuk itu, perlu ada perbaikan dalam pengorganisasian, dengan jelas mendefinisikan tugas setiap guru, baik guru kelas maupun guru pendamping. Selain itu, diperlukan peningkatan kompetensi guru dalam mengelola kelas inklusif melalui pelatihan yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Sekolah juga perlu merencanakan pengembangan fasilitas yang lebih mendukung, seperti ruang serbaguna yang dapat digunakan untuk terapi atau dukungan khusus bagi ABK, serta alat bantu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pembiayaan shadow teacher, yang saat ini bergantung pada orang tua, harus menjadi perhatian khusus, dan peran shadow teacher yang bukan tenaga profesional

perlu dipertimbangkan untuk diperbaiki dengan melibatkan tenaga ahli yang terlatih.

Implementasi pembelajaran inklusif yang masih terbatas menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan siswa ABK secara optimal. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian strategi pembelajaran yang lebih individual dan berbasis pada kebutuhan masing-masing siswa. Pembelajaran diferensiasi, seperti yang dijelaskan oleh Tomlinson (2001), harus menjadi bagian integral dari praktik pengajaran di kelas inklusif. Guru perlu dilatih untuk dapat memberikan pembelajaran yang lebih adaptif, fleksibel, dan berbasis pada kekuatan dan kelemahan masing-masing siswa, khususnya ABK. Implementasi Rencana Pembelajaran Individual (RPI) yang konsisten dan terstruktur harus segera diwujudkan, dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk orang tua dan tenaga profesional, dalam merancang dan memonitor kemajuan ABK.

Pengendalian yang lemah dan tidak adanya evaluasi berkelanjutan terhadap program inklusif di SD Negeri 25 menunjukkan perlunya sistem evaluasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya perlu dilakukan untuk kemajuan siswa ABK, tetapi juga untuk efektivitas pembelajaran dan pengelolaan kelas oleh guru. Oleh karena itu, sekolah perlu membuat sistem pemantauan yang lebih transparan dan terstruktur, yang mencakup penilaian kemajuan ABK, kinerja guru, serta kualitas manajemen pendidikan inklusif secara keseluruhan. Umpan balik yang konstruktif dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi harus menjadi bagian dari budaya kerja di sekolah. Pengawasan dari pengawas sekolah dan dinas pendidikan juga harus lebih proaktif, dengan memberikan rekomendasi dan dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan selama proses evaluasi.

Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga yang peduli terhadap pendidikan inklusif, sudah dilakukan, namun dukungan dari pemerintah dan pengawas sekolah masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya keterlibatan yang lebih aktif dari pihak-pihak luar dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam hal ini, penguatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, universitas, serta organisasi non-pemerintah yang fokus pada pendidikan inklusif perlu

ditingkatkan. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran ABK melalui penyediaan shadow teacher harus lebih diatur dengan jelas, sehingga tidak hanya bergantung pada kemampuan orang tua, tetapi juga didukung oleh pelatihan dan panduan yang memadai.

Guru di SD Negeri 25 Banda Aceh, yang mayoritas tidak memiliki latar belakang pendidikan inklusi, perlu mendapatkan pelatihan lebih lanjut dalam manajemen kelas inklusif dan pembelajaran diferensiasi. Pembekalan yang lebih komprehensif bagi seluruh guru, termasuk pelatihan berkelanjutan dalam mengelola kelas inklusif, penyesuaian kurikulum, serta strategi untuk menangani ABK, sangat diperlukan. Selain itu, perlu ada program pengembangan profesional yang terstruktur untuk memastikan bahwa guru dapat terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam pendidikan inklusif. Pengetahuan yang lebih mendalam tentang kebutuhan siswa ABK dan cara-cara adaptasi kurikulum yang sesuai akan memberikan dampak positif bagi proses belajar mengajar yang lebih inklusif dan efektif.

Secara keseluruhan, implikasi dari temuan penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan secara menyeluruh dalam manajemen pendidikan inklusif, dimulai dari kebijakan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan yang lebih terstruktur, serta evaluasi yang lebih baik. Semua pihak terkait, termasuk pemerintah, pengawas pendidikan, pihak sekolah, dan masyarakat, harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung kebutuhan setiap anak, khususnya anak berkebutuhan khusus. Ke depan, pendidikan inklusif yang efektif hanya dapat tercapai jika ada perencanaan yang lebih matang, kolaborasi yang solid, serta komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat.

5.3 Rekomendasi

Untuk Kepala Sekolah:

1. Perkuat Visi dan Misi Inklusif: Rumuskan visi dan misi inklusif yang jelas untuk menjadi dasar perencanaan strategis sekolah.
2. Implementasi RPI: Pastikan RPI disusun dan diterapkan sesuai kebutuhan

siswa ABK, dengan dukungan orang tua dan shadow teacher.

3. Pelatihan Berkelanjutan: Berikan pelatihan rutin bagi guru tentang pendidikan inklusif dan diferensiasi pembelajaran.
4. Koordinasi Antar Guru: Perkuat koordinasi antara guru kelas dan guru pendamping untuk pengelolaan kelas inklusif.
5. Optimalisasi Sumber Daya: Alokasikan anggaran untuk fasilitas dan alat bantu pembelajaran yang mendukung ABK.
6. Evaluasi Rutin: Lakukan evaluasi berkala untuk memantau kemajuan ABK dan perbaiki kekurangan dalam implementasi inklusi.

Untuk Dinas Pendidikan Setempat:

1. Pelatihan Guru dan Kepala Sekolah: Berikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan guru dan kepala sekolah dalam pendidikan inklusif.
2. Penyediaan Fasilitas: Alokasikan dana untuk fasilitas inklusif, seperti ruang terapi dan alat bantu pembelajaran.
3. Perkuat Koordinasi: Tingkatkan koordinasi antara pengawas, sekolah, dan lembaga eksternal terkait inklusi.
4. Kebijakan Mendukung Inklusi: Susun kebijakan yang mendukung implementasi pendidikan inklusif dengan alokasi anggaran dan fasilitas yang memadai.

Untuk Kementerian Pendidikan:

1. Kurikulum Ramah Inklusif: Susun kurikulum yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa ABK.
2. Alokasi Dana Inklusif: Sediakan dana khusus untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif di sekolah.
3. Pelatihan dan Sertifikasi Guru: Pastikan guru mendapat pelatihan dan sertifikasi dalam pendidikan inklusif.
4. Monitoring dan Evaluasi: Lakukan evaluasi rutin terhadap implementasi pendidikan inklusif di sekolah untuk perbaikan berkelanjutan.
5. Sistem Dukungan Profesional: Kembangkan jaringan dukungan profesional

untuk membantu guru dan sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif.

Dengan rekomendasi ini, diharapkan sistem pendidikan inklusif di SD Negeri 25 Banda Aceh dapat diperbaiki, dengan lebih banyak dukungan dari berbagai pihak agar ABK dapat belajar secara optimal.